

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Dinas Koperasi dan UKM Kota makassar

Sejarah singkat terbentuknya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan menengah kota makassar berawal dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 perkoperasian dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan adanya perubahan derugulasi pada tahun 2015 dari Perindustrian perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga terjadinya pemisahan menjadi dua Dinas yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sehingga Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016); dan Peraturan Walikota Kota Makassar 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2016) .

Jumlah UMKM 2022-2023 berdasarkan kecamatan yang ada di Kota makassar adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah UMKM 2022-2023 berdasarkan kecamatan

NO.	UMKM 2022-2023 BERDASARKAN KECEMATAN	JUMLAH UMKM
1	Tamalanrea	150
2	Biringkanaya	225
3	Manggala	1.119
4	Panakukang	335
5	Tallo	429
6	Ujung Tanah	207
7	Bontoala	139
8	Wajo	160
9	Ujung Pandang	415
10	Makassar	256
11	Rappocini	551
12	Tamalate	668
13	Mamajang	305
14	Mariso	242
15	Kepulauan Sangkarang	86
TOTAL		5.287

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

2. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota makassar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota makassar Nomor 8 Tahun 2016); dan Peraturan Walikota Kota makassar 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM (Lembaran Daerah Kota makassar Nomor 98 Tahun 2016) maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota makassar mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah
3. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

a. Visi Dinas Koperasi dan UKMKota Makassar

“Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kuat dan kompetitif bagi pengembangan daerah”

b. Misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Meningkatkan peranan dan daya dukung organisasi unit kerja bagi pengembangan kegiatan berusaha serta meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UKM;
2. Membangun sinergitas positif antar Koperasi, UKM dan masyarakat dalam peningkatan produktifitas;
3. Meningkatkan daya saing komoditi unggulan daerah dengan pemanfaatan sumber daya lokal untuk kemandirian Koperasi dan UKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah;
4. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel serta pembinaan, pengawasan dan

pengendalian untuk memberi peluang dalam menggerakkan regulasi usaha;

5. Memberikan peluang berusaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan UKM dengan training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa anggaran.

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Laki – Laki	10	16,7%
2	Perempuan	50	83,3%
Total		60	100%

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui bahwa jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 60 orang yang terdiri atas 16,7% berjenis kelamin laki – laki dan 83,3% berjenis kelamin perempuan.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan kepemilikan NPWP :

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Memiliki NPWP	45	75%
2	Tidak Memiliki NPWP	15	25%
Total		60	100%

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 6 di atas diketahui bahwa responden yang memiliki NPWP sebanyak 75% atau 45 orang, sementara yang tidak memiliki NPWP sebanyak 25% atau 25 orang.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet

Berikut karakteristik responden berdasarkan omzet :

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	< 300 juta	42	70%
2	300 juta – 2 milyar	16	26,7%
3	2 – 4,8 milyar	2	3,3%
Total		60	100%

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 7 di atas diketahui bahwa omzet yang diperoleh responden terbagi menjadi tiga kategori yaitu pertama responden dengan omzet < 300 juta sebanyak 70%. Kedua responden dengan omzet 300 juta hingga 2 milyar sebanyak 26,7%. Ketiga yaitu responden dengan omzet sebanyak 2 hingga 4,8 milyar sebanyak 3,3%.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha Di Kota Makassar

Berikut karakteristik responden berdasarkan Jenis Usaha :

Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Dagang	46	76,7%
2	Jasa	4	6,7%
3	Produksi	7	11,7%
4	Lainnya	3	5%
Total		60	100%

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 8 di atas diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis usahayang digunakan tergolong atas empat kategori seperti jenis usaha dagang berjumlah 46 orang, jenis usaha jasa berjumlah 4 orang, jenis usaha Produksi berjumlah 7 orang dan jenis usaha lainnya berjumlah 3 orang.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Berikut adalah hasil uji validitas yaitu variabel pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 9. Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Pengaruh Tarif Pajak	X1.1	0,542	0,2144	Valid
	X1.2	0,533	0,2145	Valid
	X1.3	0,427	0,2146	Valid
	X1.4	0,494	0,2147	Valid
	X1.5	0,666	0,2148	Valid
	X1.6	0,674	0,2149	Valid
	X1.7	0,761	0,2150	Valid
Pemahaman Perpajakan	X2.1	0,522	0,2151	Valid
	X2.2	0,524	0,2152	Valid
	X2.3	0,789	0,2153	Valid
	X2.4	0,743	0,2154	Valid
	X2.5	0,654	0,2155	Valid
Sanksi Perpajakan	X3.1	0,535	0,2156	Valid
	X3.2	0,752	0,2157	Valid
	X3.3	0,622	0,2158	Valid
	X3.4	0,646	0,2159	Valid
	X3.5	0,632	0,2160	Valid
	X3.6	0,622	0,2161	Valid
	X3.7	0,579	0,2162	Valid

	X3.8	0,488	0,2163	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,671	0,2164	Valid
	Y.2	0,493	0,2165	Valid
	Y.3	0,639	0,2166	Valid
	Y.4	0,671	0,2167	Valid
	Y.5	0,692	0,2168	Valid
	Y.6	0,529	0,2169	Valid
	Y.7	0,777	0,2170	Valid
	Y.8	0,663	0,2171	Valid
	Y.9	0,697	0,2172	Valid
	Y.10	0,615	0,2173	Valid

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 9 uji validitas menunjukkan bahwa keempat variabel yaitu Tarif Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah valid. Hal ini dikarenakan nilai r -hitung $>$ r -tabel yang dimana r -tabel sebesar 0,2144.

b. Uji Reliabilitas

Berikut adalah hasil uji reliabilitas yaitu variabel Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 10. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	0,654	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,682	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,751	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,838	Reliabel

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 10 uji reliabilitas menunjukkan bahwa keempat variabel

menghasilkan data yang reliabel dengan *cronbach alpha* X1 yaitu $0,654 > 0,60$. Variabel X2 menghasilkan *cronbach alphas* yaitu $0,682 > 0,60$. Variabel X3 menghasilkan *cronbach alpha* yaitu $0,751$ dan variabel Y *cronbach alpha* yaitu $0,838 > 0,60$.

3. Deskriptif Frekuensi

a. Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Pengaruh Tarif Pajak

Variabel pengaruh tarif pajak terdiri atas tujuh item pernyataan. Berikut tabel frekuensi jawaban responden berdasarkan variabel Pengaruh tarif pajak

Tabel 11. Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Pengaruh Tarif Pajak

Item	Tanggapan Responden										Total	Rata-Rata
	1		2		3		4		5			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X1.1	-	-	-	-	5	8.3	32	53.3	23	38.3	258	4.30
X1.2	-	-	-	-	16	26.7	25	41.7	19	31.7	243	4.05
X1.3	-	-	-	-	14	23.3	13	21.7	15	25.0	169	2.82
X1.4	-	-	-	-	6	10.0	34	56.7	20	33.3	254	4.23
X1.5	-	-	-	-	20	33.3	23	38.3	17	28.3	237	3.95
X1.6	-	-	-	-	17	28.3	26	43.3	17	28.3	240	4.00
X1.7	-	-	-	-	15	25.0	32	53.3	13	21.7	238	3.97

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 11 frekuensi jawaban responden berdasarkan variabel Pengaruh tarif pajak dapat dilihat bahwa rata – rata tertinggi yaitu item X1.1 dengan rata – rata 4,30, dimana 23 orang menjawab sangat setuju, 32 orang menjawab setuju dan 5 orang menjawab kurang setuju.

b. Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Pemahaman Perpajakan

Variabel pemahaman perpajakan terdiri atas lima item pernyataan. Berikut tabel frekuensi jawaban responden berdasarkan variabel tarif pajak.

Tabel 12. Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Pemahaman Perpajakan

Item	Tanggapan Responden										Total	Rata-Rata
	1		2		3		4		5			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X2.1	-	-	2	3.3	12	20.0	35	58.3	11	18.3	235	3.92
X2.2	-	-	1	1.7	16	26.7	30	50.0	13	21.7	235	3.92
X2.3	-	-	4	6.7	21	35.0	20	33.3	15	25.0	226	3.77
X2.4	-	-	-	-	15	25.0	30	50.0	15	25.0	240	4.00
X2.5	1	1.7	1	1.7	17	28.3	31	51.7	10	16.7	228	3.80

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 12 frekuensi jawaban responden berdasarkan variabel Pemahaman perpajakan dapat dilihat bahwa rata – rata tertinggi yaitu item X2.4 sebesar 4,00 dimana 15 orang menjawab kurang setuju, 30 orang menjawab setuju dan 15 orang menjawab sangat setuju.

c. Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Sanksi Perpajakan

Variabel Sanksi Perpajakan terdiri atas delapan item pernyataan. Berikut tabel frekuensi jawaban responden berdasarkan variabel Sanksi Perpajakan.

Tabel 13. Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Sanksi Perpajakan

Item	Tanggapan Responden										Total	Rata-Rata
	1		2		3		4		5			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X3.1	2	3.3	8	13.3	14	23.3	22	36.7	14	23.3	218	3.63
X3.2	1	1.7	6	10.0	13	21.7	27	45.0	13	21.7	225	3.75
X3.3	-	-	3	5.0	10	16.7	26	43.3	21	35.0	245	4.08
X3.4	-	-	4	6.7	7	11.7	29	48.3	21	35.0	250	4.17
X3.5	-	-	2	3.3	8	13.3	32	53.3	18	30.0	246	4.10
X3.6	-	-	-	-	13	21.7	27	45.0	20	33.3	247	4.12
X3.7	-	-	1	1.7	10	16.7	31	51.7	18	30.0	246	4.10
X3.8	-	-	3	5.0	9	15.0	23	38.3	25	41.7	250	4.17

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 13 frekuensi jawaban responden berdasarkan variabel Sanksi Perpajakan dapat dilihat bahwa rata – rata tertinggi yaitu item X3.4 dan X3.8 dengan rata – rata 4,17. Item X3.4 sebanyak 4 orang menjawab tidak setuju, 7 orang menjawab kurang setuju, 29 menjawab setuju dan 21 orang menjawab sangat setuju. Adapun itu X3.8 sebanyak 3 orang menjawab tidak setuju, 9 orang menjawab kurang setuju, 23 orang menjawab setuju dan 25 orang menjawab sangat setuju.

d. Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak terdiri atas sepuluh item pernyataan. Berikut tabel frekuensi jawaban responden berdasarkan variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel 14. Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	Tanggapan Responden										Total	Rata-Rata
	1		2		3		4		5			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Y.1	-	-	-	-	24	40.0	25	41.7	11	18.3	227	3.78
Y.2	-	-	-	-	9	15.0	40	66.7	11	18.3	242	4.03
Y.3	-	-	-	-	6	10.0	36	60.0	18	30.0	252	4.20
Y.4	-	-	2	3.3	7	11.7	35	58.3	16	26.7	245	4.08
Y.5	-	-	3	5.0	8	13.3	37	61.7	12	20.0	238	3.97
Y.6	-	-	9	15.0	14	23.3	27	45.0	10	16.7	218	3.63
Y.7	-	-	1	1.7	11	18.3	36	60.0	12	20.0	239	3.98
Y.8	-	-	1	1.7	15	25.0	26	43.3	18	30.0	241	4.02
Y.9	-	-	-	-	15	25.0	31	51.7	14	23.3	239	3.98
Y.10	-	-	1	1.7	13	21.7	37	61.7	9	15.0	234	3.90

Sumber: Data diolah (2024)

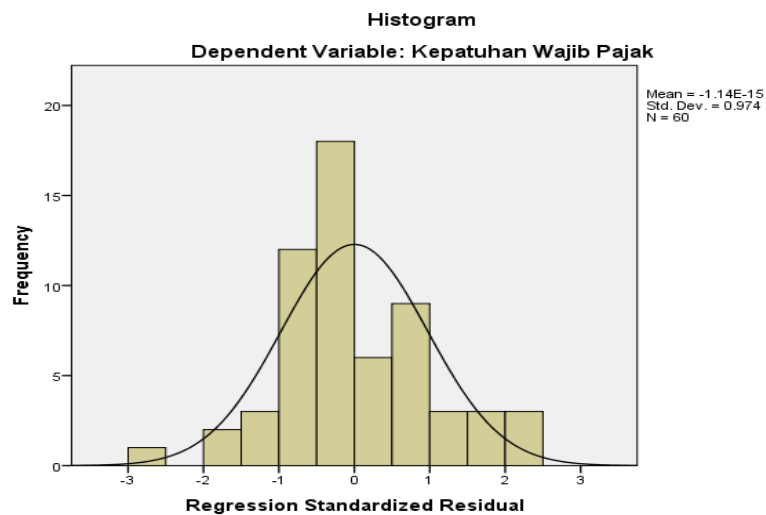
Tabel 14 frekuensi jawaban responden berdasarkan variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat bahwa rata – rata tertinggi yaitu item Y.3 sebesar 4,20 dimana 6 orang menjawab kurang setuju, 36 orang menjawab setuju dan 18 orang menjawab sangat setuju.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan diagram histogram. Dengan ketentuan pola distribusi yang tidak menceng ke kanan dan ke kiri dikatakan data tidak berdistribusi normal. Sementara apabila data berbentuk lonceng maka dikatakan data berdistribusi normal.

Gambar 2. Uji Normalitas Histogram

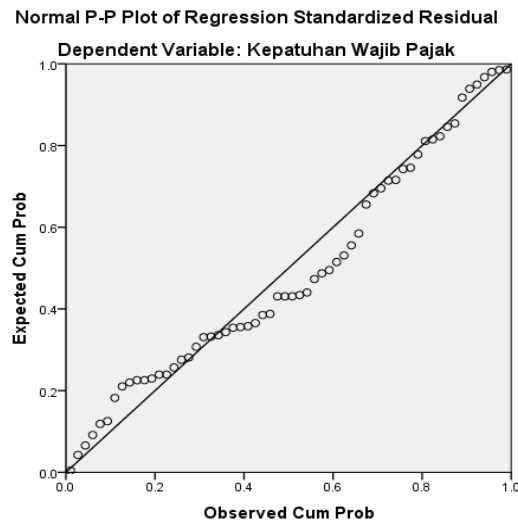


Sumber: Data diolah (2024)

Grafik histogram di atas menggambarkan pola distribusi yang tidak menceng ke kanan dan ke kiri, tetapi tepat ditengah seperti bentuk lonceng maka hasil tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Selain itu uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik p-plot dengan ketentuan apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan apabila data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 3. Uji Normalitas P-Plot



Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan gambar uji normalitas p-plot diketahui bahwa data berdistribusi normal sebab data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

b. Uji Multikolinearitas

Berikut hasil uji multikolinearitas ketiga variabel tarif pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan.

Tabel 15. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengaruh Tarif pajak	.780	1.282
	Pemahaman perpajakan	.697	1.435
	Sanksi Perpajakan	.834	1.200
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber: Data diolah (2024)

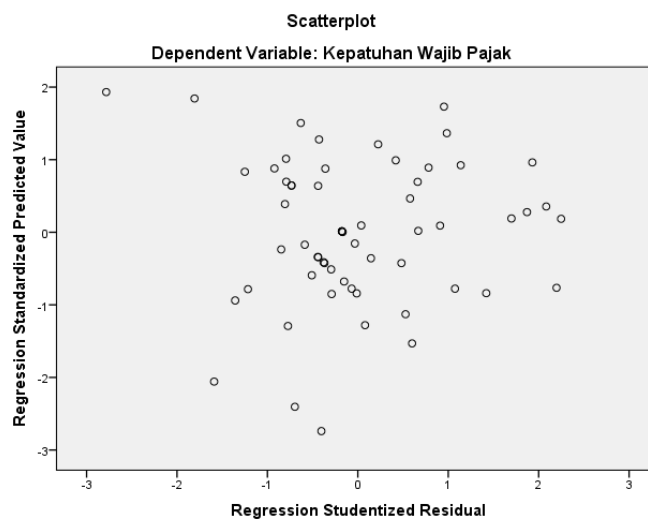
Tabel 15 uji multikolinearitas di atas dapat menunjukkan nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk semua variabel yaitu Pengaruh

tarif pajak, pemahaman perpajakan dan Sanksi Perpajakan memiliki nilai lebih kecil daripada 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

c. Uji Heteroskadastisitas

Berikut adalah hasil uji heteroskadastisitas menggunakan scatterplot :

Gambar 4. Uji Heteroskadastisitas



Sumber: Data diolah (2024)

Gambar 4 uji heteroskadastisitas memperlihatkan bahwa tidak terjadi heteroskadastisitas karena titik-titik data menyebar di atas, di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas dan dibawah saja.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh positif atau negatif terhadap variabel Y. Berikut adalah hasil regresi linear berganda variabel tarif pajak (X1) Pemahaman Perpajakan

(X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 16. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.352	5.270		1.205	.233
	Pengaruh Tarif Pajak	.505	.180	.320	2.801	.007
	Pemahaman Perpajakan	.541	.220	.297	2.459	.017
	Sanksi Perpajakan	.260	.121	.237	2.147	.036
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 16 di atas menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,352 + 0,505 X1 + 0,541 X2 + 0,260 X3$$

Dalam persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) Konstan

Konstanta (a) sebesar 6,352 hal ini berarti jika tarif pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) secara bersama-sama tidak mengalami perubahan atau sama dengan nol (0) maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) yakni 6,352.

2) Tarif Pajak (X1)

Nilai koefisien regresi untuk variabel Tarif Pajak (X1) adalah sebesar 0,505. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa Tarif Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

(Y), hal ini menunjukkan bahwa ketika Tarif Pajak (X1) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat.

3) Pemahaman Perpajakan (X2)

Nilai koefisien regresi untuk variabel pemahaman perpajakan (X2) adalah sebesar 0,541. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pemahaman perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa ketika pemahaman perpajakan (X2) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat.

4) Sanksi Perpajakan (X3)

Nilai koefisien regresi untuk variabel Sanksi Perpajakan (X3) adalah sebesar 0,260. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa ketika Sanksi Perpajakan (X3) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat.

6. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan

Hasil pengujian untuk uji F (simultan) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	536.717	3	178.906	14.074	.000 ^b
	Residual	711.866	56	12.712		

Total	1248.583	59		
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				
b. Predictors: (Constant), Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, Sanksi Perpajakan				

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji F (uji simultan) menunjukkan bahwa nilai F sebesar 14,074 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, karena probabilitas atau nilai Sig menunjukkan 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tarif pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Koefisien Determinasi

Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 18. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.656 ^a	.430	.399	3.565
a. Predictors: (Constant), Pengaruh tarif pajak, pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan,				

Sumber: Data diolah (2024)

Koefisien determinasi pada nilai R Square yaitu 0,430 atau 43%, yang menunjukkan bahwa variasi dari kepatuhan wajib pajak (Y), dapat dijelaskan Pengaruh tarif pajak (X1), pemahaman perpajakan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3), sedangkan sisanya sebesar 57% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak merupakan sebuah presentase yang ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan untuk dijadikan acuan dalam menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak. Untuk menghitung jumlah pajak yang terutang diperlukan dua elemen yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan hasil analisis Regresi linear berganda disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna UMKM di kota makassar dibuktikan dengan melihat nilai signifikansi tarif pajak $0,007 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan adanya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, tarif yang akan ditetapkan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak pengguna UMKM kota makassar. Selain itu, sebagian besar responden setuju bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah sudah proporsional atau sebanding serta adil sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan teori *Theory of Planned Behavior* (TPB). Tarif pajak berkaitan dengan keyakinan *normatif belief* bahwa wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya jika tarif pajak yang diberikan sesuai.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zulma, G. W. M. (2020) dan Mariani *et al.* (2020), dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Atik Sulistyoningih. (2019) terjadi hal yang bertentangan yaitu tarif pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan adalah kondisi dimana masyarakat mengetahui tentang perpajakan. Pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan dengan baik tidak akan kebingungan dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan hasil analisis Regresi linear berganda disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota makassar dibuktikan dengan melihat nilai signifikansi Pemahaman Perpajakan $0,017 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan apabila terjadi peningkatan pemahaman perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak pada pengguna UMKM pun meningkat. Pemahaman wajib pajak sangatlah mempengaruhi tingkat kesadaran pengguna UMKM Di kota makassar sehingga mereka cenderung membayar pajak tepat waktu.

Hal ini sesuai dengan teori *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini juga mengungkapkan bahwa perilaku yang timbul dari setiap individu, hal ini disebabkan adanya niat untuk mempengaruhi perilaku individu untuk mematuhi semua aturan perpajakan. Pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh pengguna UMKM merupakan suatu *behavioral belief*. Responden UMKM pada penelitian ini telah memiliki pemahaman tentang

pajak, sehingga dengan Pemahaman yang mereka miliki maka akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak untuk taat membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan L. K. Inten Pratiwi Sucandra & Ni Luh Supadmi (2016) pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran, membuktikan semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Maka, semakin patuh untuk memenuhi kewajibannya.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam norma perpajakan yang akan dituruti, ditaati, dipatuhi.

Berdasarkan hasil analisis Regresi linear berganda disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna UMKM di kota Makassar dibuktikan dengan melihat nilai signifikansi sanksi perpajakan $0,036 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi yang diberikan karena pelanggaran yang telah dibuat oleh wajib pajak membuat wajib pajak pengguna UMKM di kota Makassar jera, maka mendorong Wajib Pajak pengguna UMKM di kota Makassar untuk lebih patuh. Tak hanya itu sebagian besar responden setuju bahwa sanksi pajak mempunyai peran yang penting dalam penerimaan negara dan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah jelas dan tegas.

Hal ini sesuai dengan teori *Theory of Planned Behavior* (TPB). Sanksi

perpajakan mengacu pada *control belief*, dimana sanksi perpajakan berperan dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak jika mereka gagal dan tidak taat membayar pajak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Riyanto Wujarso, Saprudin, dan Rina Dameria Napitupulu (2020) sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil yang bertentangan terhadap penelitian yang dilakukan Afeni Maxuel, dan Anita Primastiwi (2021) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.